

BAB III

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN

PARTAI MASYUMI

A. Latar Belakang Berdirinya Partai Masyumi

Sejarah perkembangan partai politik Islam sudah ada sejak zaman Belanda. Kemudian partai-partai politik Islam dan nasionalis dibubarkan pada masa pendudukan Jepang. Sebagai gantinya Jepang membentuk MIAI (*Majelis Islam A'la Indonesia*) yang pada tahun 1943 dibubarkan dan digantikannya dengan membentuk Masyumi (*Majelis Syuro Muslimin Indonesia*).¹ Masyumi (*Majelis Syuro Muslimin Indonesia*) dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1943, menggantikan MIAI yang tidak disukai Jepang karena tidak bias dikendalikan. Sedangkan dalam Masyumi organisasi muslim lainnya bergabung seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam.²

Masa pendudukan Jepang menjadi proses kelahiran Masyumi. Pemerintahan militer Jepang, melalui kebijakan politik berupaya memasukkan Islam Indonesia sebagai bagian dari politik perang. Kemudian pada November 1943, lahirlah

¹Moch. Nurhasin, *Masa depan Partai Islam do Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016)., p. 41.

²Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005)., P. 40.

Masyumi (*Majelis Syuro Muslimin Indonesia*).³ Mengenai hubungan antara Masyumi dengan partai Islam yang didirikan pada bulan November 1945 lebih rumit. Karena pembagian peran antara para ulama pemimpin perkumpulan-perkumpulan besar Islam (Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama), sedangkan disisi lain dari politisi gerakan Sarekat Islam. Pihak yang pertama dari kalangan ulama menjadi pemimpin Masyumi pada masa Jepang. Sedangkan pihak dari politisi Sarekat Islam menduduki kedudukan jajaran eksekutif.

Jepang berhasil menemukan Islam Asia dan mengangkatnya sebagai sebagai salah satu proses utama politik. Jepang mengirim sejumlah mahasiswa untuk belajar di Mesir demi memprogandakan Islam. Pada tahun 1939 Tokyo menjadi tuan rumah konferensi Pan-Islamis yang dihadiri para wakil MIAI. Jepang langsung membuat landasan tumpuan ditengah masyarakat Islam Indonesia dalam rangka memobilisasi dukungan penduduk.

Pemerintahan Jepang menolak terhadap segala bentuk sekpresi politik Islam. Kemudian Jepang membentuk organ-organ sendiri untuk mengendalikan Islam Indonesia diantaranya: Komite Persiapan Persatuan Ummat Islam diketuai oleh Abikusno Tjokjrosujoso serta Biro Urusan Agama (*Shumubu*) yang pada mulanya dipimpin oleh orang Jepang kemudian pada tahun 1944 dialihkan kepada seorang ulama tradisional yaitu KH.

³Remy Madinier, *Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*. (Bandung: Mizan , 2013).,p.46.

Hasyim Asy'ari. Untuk memiliki organisasi masa Jepang mengizinkan pendirian MIAI pada September 1942 dengan upaya untuk memegang peran penting dalam kerangka Tiga A (Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia).⁴

MIAI (*Miajelis Islam A'la Indonesia*) berdiri sebagai wadah dari organisasi-organisasi Islam. MIAI berdiri sebelum partai Masyumi, bahkan sebelum Masyumi (*Majelis Syuro Muslimin Indonesia*), dengan tujuan-tujuan yang sangat mulia dengan menggabungkan segala potensi umat Islam, sebagai berikut:

1. Menggabungkan segala perhimpunan umat Islam Indonesia untuk bekerja bersama-sama.
2. Berusaha mengadakan perdamaian apabila timbul pertikaian diantara golongan umat Islam Indonesia, baik yang sudah tergabung dalam MIAI maupun yang belum.
3. Merapatkan perhubungan antara umat Islam Indonesia, dengan umat Islam di luar Indonesia.
4. Berdaya upaya untuk keselamatan agama Islam dan umatnya.
5. Membangun Kongres Muslimin Indonesia (KMI).⁵

Poin terakhir dari tujuan didirikannya MIAI, kemudian diwujudkan oleh para tokoh Islam dalam kongres di Yogyakarta

⁴Madinier, *Partai Masjumi...*, p.46.

⁵Artawijaya, *Belajar dari Partai Masyumi*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), p.53.

yang mewujudkan berdirinya partai Masyumi. Sebelumnya MIAI hanya gerakan sosial keagamaan. Semangat untuk bersatu dan membela kepentingan umat Islam sudah sejak sebelum berdirinya partai Politik.

Indonesia yang menjadi bagian dari organisasi yang didirikan Jepang, menyadari bahwa niat baik Jepang hanya untuk memeralat kalangan Islam untuk mencapai suatu tujuan, yaitu mendukung usaha peperangan Jepang. Niat bekerja sama dengan para ulama tidak tercapai ketika kecerobohan tentara Jepang ketika mengadakan *Sakeirei*.⁶ Dipihak ulama sulit untuk menerima kegiatan *sakeirei* karena kemiripan dengan ibadah shalat yang menghadap ke Makkah. Kiyai Hasyim Asy'ari dan Kiyai Muhammad Siddiq dua tokoh pemimpin Nadhlatul Ulama dijebloskan ke penjara karena menolak untuk membungkukkan badan dalam upacara penghormatan *sakeirei*. Anggota dan pengurus MIAI satu persatu mulai mengundurkan diri. Kemudian anggota dari MIAI yang mengundurkan diri membentuk perkumpulan mengadakan kegiatan membantu orang yang tidak mampu, dengan cara pengumpulan zakat. Kegiatan ini disebut *Bait Al-Mal* dan meraih keberhasilan dalam waktu singkat. Kegiatan MIAI yang meluas meliputi 35 kresidenan di Jawa mulai menyaingi Biro Urusan Agama yang menjadi organ resmi

⁶Sakeirei yaitu upacara penghormatan pada Kaisar dengan cara membungkukkan badan dan menghadap kearah Tokyo.

untuk pengendalian Islam di daerah. Kemudian atas campur tangan otoritas militer organisasi MIAI dihentikan.⁷

Pembentukan Masyumi tidak terlepas dari faktor-faktor yang melatarbelakanginya seperti, suasana revolusi dan persaingan berbagai kelompok ideologi di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Peran tokoh-tokoh yang mengambil inisiatif ikut mewarnai pembentukan Masyumi. Partai Masyumi didirikan dan di ikrarkan sebagai satu-satunya partai politik Islam pada tanggal 7 November tahun 1945 berdasarkan Kongres Umat Islam di Yogyakarta yang diselenggarakan pada tanggal 7-8 November 1945 bertepatan dengan 1-2 Dzulhijjah 1346 H. Inisiatif pembentukan Masyumi berasal dari sejumlah tokoh partai politik dan gerakan sosial keagamaan Islam sejak zaman pergerakan, seperti Agus Salim, Prof Abdul Kahar Muzakkir, Abdul Wachid Hasyim, Mohammad Natsir, Mohammad Roem, Prawoto Mangkusasmito, Dr. Sukiman Wirosanjojo, Ki Bagus Hadikusumo, Mohammad Mawardi, dan Dr. Abu Hanifah.⁸

Keputusan pembentukan Masyumi oleh sejumlah tokoh Islam tidak sekedar sebagai keputusan tokoh, tetapi keputusan dari seluruh umat Islam melalui utusan-utusan. Susunan kepengurusan Masyumi terdapat dari wakil-wakil partai politik dan gerakan sosial keagamaan Islam, sebagai berikut:

⁷Madinier, *Partai Masjumi...*, p.47.

⁸Samsuri, *Partai Islam Anti Komunis: Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal*. (Yogyakarta: Safira Insania Press, 2004).,p.10.

a. Majelis Syuro (Dewan Partai)

Hadratus Syeikh KH. Hasyim Asy'ari (NU), Ketua Umum

Ki Bagus Hadikusumo (Muhammadiyah), Ketua Muda I

K.H.A. Wachid Hasyim (NU), Ketua Muda II

Mr. Kasman Singodimedjo (Muhammadiyah), Ketua Muda III

Anggota:

RHM Adnan (Persatuan Penghulu dan Pegawainya, PPDP)

H. Agoes Salim (Penjadar)

KH. Abdul Wahab (NU)

KH. Sanusi (PUI)

KH. Abdul Halim (PUI)

Syekh Djamil Djambek (Majelis Tinggi, MIT)

b. Pengurus Besar

Dr. Sukiman Wirosandjojo (PII), Ketua

Abikusno Tjokrosujoso (PSII), Ketua Muda I

Wali Alfatah (PII), Ketua Muda II

Harsono Tjokroaminoto (PSII), Sekertaris I

Prawoto Mangkusasmito (Muhammadiyah), Sekertaris II

Mr. RA Kasmat (PII), Bendahara.

Pemimpin Bagian Penerangan:

Wali Alfatah (PII)

Bagian Barisan Sabilillah dan Hizbullah:

KH. Masjkur (NU)

W. Wondoamiseno (PSII)

H. Hasjim (Muhammadiyah)

Sulio Hadikusumo (JIB)

Bagian Keuangan:

Mr. RA Kasmat (PII)

R. Prawiro Juwono (Muhammadiyah)

H. Hamid BKM (Muhammadiyah)

Harsono Tjokroaminoto (PSII)

Anggota-anggota:

KH. Dahlan (NU)

H.M farid Ma'ruf (Muhammadiyah)

Junus Anis (Muhammadiyah)

KH. Fathurrahman (NU)

Dr. Abu Hanifah

Mohammad Natsir (Persis)

SM Kartosuwirjo (PSII Baru)

Anwar Tjokroaminoto (PSII)

Dr. Sjamsuddin (Muammadiyah)

Mr. Mohammad Roem (Penjadar)

Perkara-perkara besar yang dianggap penting adalah menyikapi suasana revolusi Indonesia dan persaingan berbagai ideologi politik dalam masyarakat Indonesia. Tujuan Masyumi pada Kongres Umat Islam adalah menegakkan kedaulatan

Republik Indonesia dan Agama Islam dengan senantiasa melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan.⁹

B. Pertumbuhan Partai Masyumi

1. Asas Partai Masyumi

Partai Masyumi berdasarkan pada Islam dan bertujuan terlaksananya ajaran dan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Asas merupakan landasan, titik tolak, tempat berpijak dan ruh bagi perjuangan. Partai Masyumi menjadikan Asas Islam sebagai asas perjuangan. Tafsir asas Masyumi terdapat dalam ayat Al-Qur'an (Surat Ali Imran ayat 112):

"ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ لَأَنَّ مَا كَفَرُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ ،،،،،"

Artinya: "...Ditimpakan atas mereka kehinaan dimna saja mereka berada kecuali orang-orang yang tetap menjaga hubungannya dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia..."(Q.S Ali Imran: 112).

Islam sebagai asas partai Masyumi adalah ruh perjuangan. Partai Masyumi menawarkan gagasan-gagasan Islam ditengah sistem buatan manusia seperti komunisme, kapitalisme yang menghisap kaum buruh, sosialisme yang meniadakan kepemilikan pribadi, skularisme yang netral Agama (*Laadiniyah*),

⁹Samsuri, *Partai Islam Anti Komunis...*,p.12.

humanism yang mengedepankan kemanusiaan. Partai Masyumi memandang Indonesia bukan sebagai medan peperangan golongan. Dengan menyikapi Republik Inonesia terhadap keselamatan dan pembangunan negara Republik Indonesia.¹⁰

2. Ideologi Partai Masyumi

Kelompok Islam maupun Nasionalis mempunyai sebuah Ideologi sebagai gagasan dari sebuah tujuan. Pada umumnya partai-partai Islam, seperti Masyumi, PSII, NU, Perti dan PPTI. Mempunyai Anggaran Dasar masing-masing dan mengambil sumber tujuan dan faham dari Al-Quran dan Sunnah serta ideologi Masyumi¹¹ Demokrasi, hukum dan keadilan merupakan suatu prinsip politik yang dijadikan pedoman di kalangan Islam dengan ideologinya prinsip *Syuro*.

Dalam kalangan Islam, *Syuro* merupakan bagian dari *Syariah* yang harus ditegakkan. Prinsip *Syuro* dalam kalangan Islam dihubungkan dengan demokrasi. *Syuro* dalam partai dicerminkan dalam rapat, konferensi, dan kongres. *Syuru* dalam negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Konstituante, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lembaga kepartaian pada umumnya dijadikan sebagai sarana untuk mengadakan *Syuro*.¹²

¹⁰Artawijaya, *Belajar dari Partai Masyumi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), p. 25-27.

¹¹Daliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia*, cetakan ke-2 (Bandung: Mizan. 2000), p.460.

¹²Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional...*, p.464-465.

Perbedaan pandangan antara Nasionalis dan Masyumi. Masyumi mengkaitkan prinsip *syuro* dengan perkembangan demokrasi pada masa modern, kebebasan manusia yang dijamin dengan hukum. Dan berfungsi sebagai pelembagaan seperti DPR, Koinstituanten dan Mahkamah Agung. Sedangkan kaum Nasionalis, sesuai dengan hukum dan revolusi. Masyumi berpegang pada demokrasi, beberapa tokohnya seperti Mohammad Natsir, Boerhanudin Harahap dan Sjafruddin Prawiranegara, berjuang untuk menegakkan Demokrasi.¹³

C. Perkembangan Partai Masyumi

1. Masyumi Sebagai Pemersatu Umat

Sejak berdirinya partai Masyumi hasil dari Mukhtamar di Yogyakarta, pada tanggal 7-8 November tahun 1945.¹⁴ Masyumi didukung oleh organisasi-organisasi Islam yang didirikan pada masa penjajahan Belanda. Seperti Nahdlatul Ulama pada tahun 1926, Muhammadiyah pada tahun 1912 dan organisasi Sosial keagamaan lainnya. Dukungan-dukungan dari organisasi-organisasi itu dapat dilihat dari keterlibatannya pada Mukhtamar Umat Islam pada tahun 1945 yang dilaksanakan di Yogyakarta, sehingga bertambahnya anggota dan berkembang dengan cepat.

Pada mulanya hanya ada empat organisasi yang bergabung dengan Masyumi, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Perserikatan Umat Islam dan Perserikatan Umat Islam.

¹³Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional...*, p.467.

¹⁴Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional...*, p.51.

Muhammadiyah merupakan pembaharu sedangkan Nahdlatul Ulama bersifat tradisional. Sedangkan organisasi yang lain bersifat tradisional dalam soal-soal agama, tetapi cenderung bersifat modern dalam permasalahan dunia, sehingga dapat bergabung dengan organisasi modern dan tradisional. Organisasi-organisasi lain yang ikut bergabung dengan Masyumi seperti Persatuan Islam (Bandung) tahun 1948 dan Al-Irsyad (Jakarta) bergabung pada tahun 1950.¹⁵

Dua organisasi dari Sumatra ikut bergabung dengan Masyumi seperti, Al-Jamiyatul Washliyah tahun 1949, Al-Ittihadiyah tahun 1949, dan Persatuan Ulama Aceh (PUSA) bergabung pada tahun 1949. Setelah hubungan antara Yogyakarta dengan Sumatra Utara, kemudian setelah terjalinnya hubungan keduanya, banyak organisasi Islam di daerah bergabung dengan Masyumi dan menjadikan cabang Masyumi.¹⁶

Suatu organisasi Islam dapat menjadi anggota Masyumi bila disetujui oleh lebih dari setengah anggota Istimewa Masyumi. Untuk masuk Masyumi tidak ada kesukaran karena semua pihak memang merasa perlu bergabung dan memperkuat barisan Islam.

2. Masyumi dan Tata Negara

Masyumi didirikan sebagai satu-satunya partai Islam di Indonesia pada tanggal 7 November 1945. Masyumi mempunyai anggaran dasar yang menyatakan bahwa partai masyumi

¹⁵Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional...*, p.53-54.

¹⁶Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional...*, p.53.

bertujuan untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan agama Islam. Pada bulan Desember 1945, Masyumi mengeluarkan suatu program yang mengemukakan bahwa partai bermaksud untuk mewujudkan cita-cita Islam dan kenegaraan, sehingga dapat mewujudkan suatu negara yang berdasarkan suatu kedaulatan rakyat dan masyarakat menurut ajaran Islam.¹⁷

Pada tanggal 6 Juli 1947 Masyumi mengeluarkan manifesto politik diantaranya yaitu:

1. Dalam hubungannya dengan luar negeri, Masyumi berusaha agar politik umat Islam Indonesia dapat menempatkan negara Republik Indonesia berdampingan dengan Negara-negara lain.
2. Masyumi berusaha menyebarkan ideologi Islam dikalangan masyarakat Indonesia dengan memperkokoh sendi Ketuhanana Yang Maha Esa.¹⁸

Republik Indonesia merupakan suatu negara demokrasi. Dari anggaran dasar maupun manifesto, Masyumi menerima prinsip kedaulatan rakyat dan sistem demokrasi sesuai dengan ajaran Islam. Bangsa Indonesia dengan sitem pemerintahan demokrasi tetapi tidak memusuhi negara-negara dengan sitem pemerintahan sosialis.

3. Nahdlatul Ulama keluar dari Masyumi

¹⁷Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : ajaran sejarah dan pmikiran*, (Jakarta: UI-Press, 1993) edisi ke-5.,p. 190.

¹⁸Sjadzali, *Islam dan Tata Negara...* p. 190.

Keluarnya Nahdlatul Ulama dari Masyumi pada tahun 1952. Nahdlatul Ulama masih mengusulkan Masyumi dalam bentuk federasi atau membentuk federasi baru dengan Nahdlatul Ulama, Masyumi, serta partai-partai Islam yang menjadi anggotanya. Dengan keputusan yang diberikan Nahdlatul Ulama, para pemimpin Masyumi tidak menyetujui usulan Nahdlatul Ulama. Partai yang bersifat federasi, tetapi tidak menjamin partai akan menjadi lebih kuat.¹⁹

Keluarnya Nahdlatul Ulama dari Masyumi merupakan guncangan terbesar dalam politik Islam. Akibat dari munculnya rasa permusuhan antara keduanya berdampak panjang bagi dinamika politik Indonesia. Perpecahan Nahdlatul Ulama dengan Masyumi diawali sejak Kongres Masyumi di Yogyakarta pada 1949.²⁰

Generasi baru kelompok modernis dibawah pimpinan Mohammad Natsir berhasil memenangkan kepemimpinan dan mengubah beberapa peraturan partai untuk membatasi peran *Majelis Syuro* yang dipimpin oleh Wahab Chasbullaah dan didominasi oleh ulama Nahdlatul Ulama. Kemampuan politik Kiyai juga dilecehkan oleh golongan modernis, sehingga membuat delegasi Nahdlatul Ulama melakukang pengunduran.

¹⁹Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional...*, p.57.

²⁰Greg Fealy dan Greg Barton, *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, cet. 1,(Yogyakarta: KLiS, 1997)..p. 37.

Kejadian tersebut dapat dilihat sebagai kecenderungan politik Masyumi anti tradisional.²¹

Pada kongres Nahdlatul Ulama di Jakarta (bulan April tahun 1950), komisi Nahdlatul Ulama mengusulkan untuk keluar dari Masyumi. Adapun tokoh yang mendukung pemisahan ini yaitu, KH. Wahab Chasbullah. KH. Wahab memandang tindakan Masyumi tidak sekedar usaha untuk menyingkirkan Nahdlatul Ulama, tetapi menyerang otoritasnya sebagai Ketua *Majelis syuro*.

Keluarnya Nahdlatul Ulama dari Masyumi tidak sekedar persoalan perebutan kekuasaan, bahwa jatah Menteri Agama yang seharusnya dipegang Nahdlatul Ulama kemudian diberikan pada Fakhri Usman dari Muhammadiyah. Dan peran *Majelis Syuro* yang hanya menjadi badan penasehat. Dan hal yang mendasar keluarnya Nahdlatul Ulama dari Masyumi adalah perbedaan kultur politik diantara keduanya dimana Nahdlatul ulama cenderung konservatif sedangkan Masyumi cenderung modernis yang dekat dengan Muhammadiyah.²²

Kurangnya dukungan terhadap usulan pemisahan Nahdlatul Ulama dari Masyumi, dan tidak adanya keputusan resmi. Ketegangan terus berlanjut, karena Dewan Pengurus Masyumi menolak tuntutan Nahdlatul Ulama. Pada bulan Februari tahun 1952 adanya penolakan Dewan Masyumi,

²¹Fealy dan Greg Barton, *Tradisionalisme Radikal...*, p. 37.

²²Ridho Al-Hamdi, *Partai Politik Islam: Teori Praktik Di Indonesia*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)., p. 56.

Nahdlatul Ulama berharap memegang jabatan Menteri Agama. Posisi jabatan Menteri Agama dipegang Nahdlatul Ulama dalam dua Kabinet terakhir. Setelah lepas dari Department Menteri Agama maka hilanglah kekuatan Nahdlatul Ulama dalam birokrasi.²³

Kemarahan dan kekecewaan terhadap Masyumi telah berkembang di Nahdlatul Ulama. Perpecahan Nahdlatul Ulama dan Masyumi memasuki saat tenang di akhir bulan Maret tahun 1952. Pertemuan para anggota Masyumi dan Nahdlatul Ulama ditandai digelar untuk melakukan perkumpulan atau mukhtamar. Mukhtamar menyetujui rumusan yang memutuskan keluarnya Nahdlatul Ulama dari Masyumi secara resmi pada tanggal 1 Agustus 1952.²⁴ organisasi ini menarik KH. Wahab Chasbullah, Dachlan, Masykur, Wachid Hasyim, dan Zainul Arifin dari jabatan *Majelis Syuro*, Dewan Partai, dan DPP Nahdlatul Ulama menegaskan bahwa penarikan dari Masyumitidak akan melemahkan perjuangan Islam di Indonesia selama keduanya bekerja sama.²⁵

Nahdlatul Ulama kemudian melakukan pembentukan dua badan baru untuk menyatukan organisasi-organisasi Islam, yaitu Muktamar Muslimin Indonesia dan Liga Muslim Indonesia. Dengan bantuan kerjasama Perti dan Partai Sarekat Islam Indonesia dalam pembentukan federasi baru. Faktor penarikan

²³Fealy dan Greg Barton, *Tradisionalisme Radikal...*, p. 39.

²⁴Fealy dan Greg Barton, *Tradisionalisme Radikal...*, p. 43.

²⁵Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), p.125.

Nahdlatul Ulama dari Masyumi adalah pengaruh tokoh-tokoh individual yang bertentangan dengan tokoh yang berasal dari kekuatan-kekuatan social, budaya, budaya dan sejarah yang lebih luas.²⁶

4. Masyumi dalam Pemilu 1955

Kiprah Masyumi dalam menyongsong pemilihan umum tahun 1955. Menjelang pemungutan suara yang menjadi puncak pergelaran strategi yang disusun Mohammad Natsir dan pengikutnya. Masyumi percaya dapat menjaring suara dari luar lingkaran Islamis. Pemilihan Umum 1955 bertolak belakang dengan harapan menjulang menjelang hari pemungutan suara. Keterbelahan aliran politik yang lahir pada pulan November 1945 yang telah melumpuhkan roda politik.²⁷

Karena suasana revolusi untuk mempertahankan Kenmerdekaan Republik Indonesia. Masyumi diberi kesempatan untuk memimpin pemerintahan. Pemilu menjadi program penting setiap kabinet sampai dengan ditetapkannya UU No. 7 Tahun 1953 tentang pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR. UU ini berhasil ditetapkan pada cabinet Wilopo, dimana Mohammad Roem dari Masyumi menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu. Masyumi memandang strategis pelaksanaan pemilu, selain sebagai bentuk kesanggupan bahwa Masyumi berjuang

²⁶Fealy, *Ijtihad Politik Ulama...*, p. 124.

²⁷Madinier, *Partai Masjumi...*, p.192.

diatas legal-parlemnter, juga menjadikannya sebagai sarana demokrasi guna mewujudkan tujuan Masyumi.²⁸

Karena strategi dan pentingnya pemilu untuk tujuan Masyumi, maka pada tanggal 24 Februari 1953 *Majelis Syuro* Masyumi mengeluarkan fatwa tentang hukum pemilu. Untuk kemenangan Islam dan ummatnya maka Hukum pemilu wajibatas tiap-tiap Muslim dan Muslimat yang *mukalaf* dari semua golongan, kalangan dan tingkatan.²⁹

Kampanye pemilu dimulai pada tanggal 31 Mei tahun 1954, ketika tanda gambar partai disahkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI).³⁰ Masyumi mengajukan Sukiman Wirosanjojo, dengan berkampanye di alun-alun kota Garut pada tanggal 11 September 1955. Pada dasarnya pemungutan suara untuk pemilihan anggota DPR dan Konstituante berhasil diselenggarakan oleh kabinet Burhanudin Harahap. Pemilu pada 29 September 1955, memilih 257 anggota DPR, pada 15 Desember 1955 514 anggota Konstituante. Dengan pemilu diikuti oleh 118 peserta untuk pemilihan DPR sedangkan 91 peserta untuk Konstituante.³¹

Keberhasilan pelaksanaan pemilu oleh kabinet pimpinan Masyumi tidak menghasilkan kekuatan mayoritas partai. Terdapat tiga aliran politik di DPR dan Kontituante denagn perolehan sebagai berikut: Islam 45,2% (116 dari 257 kursi),

²⁸Samsuri, *Partai Islam Anti Komunis...*, p. 75.

²⁹Samsuri, *Partai Islam Anti Komunis...*, p. 76.

³⁰Samsuri, *Partai Islam Anti Komunis...*, p.77.

³¹Samsuri, *Partai Islam Anti Komunis...*, p. 80.

Nasional 27, 6% (71 dari 257 kursi), dan Sosialis kiri (Komunis) 15,2% (39 dari 257 kursi). Masyumi sendiri dalam pemilihan anggota DPR mendapat 57 kursi (naik 29,5% dari 44 kursi sebelumnya DPRS), sedangkan di Kontituante Masyumi mendapat 112 kursi Anggota.³²

5. Penghapusan Anggota Istimewa Masyumi

Semua anggota yang beragabung pada akhirnya menjadi anggota istimewa Masyumi. Masalah anggota Masyumi setiap kali kongres diadakan selama tahun 1950-an terus dibahas. Baik dibahas oleh Masyumi maupun oleh anggota istimewa. Seperti pertanyaan yang dibahas dalam kongres adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah hubungan antara anggota istimewa dengan Masyumi baiknya?
- b. Bagaimana pula hubungan antara sesama anggota istimewa dalam hal-hal yang bersangkutan dengan politik?
- c. Apakah anggota istimewa berdiam diri dalam buidang politik atau sekedar menerima pendapat politik yang sudah dimasak oleh Masyumi?³³

Dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga parati Masyumi menyebutkan bahwa anggota istimewa berhak memajukan tuntutan-tuntutan kepada pimpinan partai dalam hal-hal yang berkaitan dengan partai. Anggota istimewa pun dapat dimintai pendapat oleh pimpinan partai. Akan tetapi anggota istimewa

³²Samsuri, *Partai Islam Anti Komunis...*, p. 80-81.

³³Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional...*, p.55.

tidak puas dengan ketentuan yang diberikan. Terdapat tiga pendapat berkembang mengenai keanggotaan istimewa, yaitu:

1. Setuju dengan apa yang berlaku, adanya anggota perseorangan, anggota istimewa. Akan tetapi kalangan ini tidak setuju dengan adanya anggota inti. Anggota Inti merupakan anggota bersaing dari anggota perseorangan. Anggota inti seharusnya lebih berkorban terhadap tujuan dan cita-cita partai.
2. Menginginkan parta berbentuk federasi, terdiri dari anggota berupa organisasi. Yang berarti penghapusan anggota perorangan.
3. Menyokong struktur keanggotaan yang berlaku, tetapi ingin menegakkan anggota inti.³⁴

Kongres partai yang pertama tahun 1945 yang mendirikan Masyumi memutuskan adanya anggota inti yang dianggap akan menjadi penggerak partai. Pada tahun 1950-an anggota inti diharapkan lebih mengetahui dan menyadari dasar-dasar, cita-cita dan kebijaksanaan partai. Partai dengan bentuk federasi dirasakan akan bersifat lambat. Susunan pimpinan partai akan mencerminkan perwakilan dasar kekuatan dari tiap-tiap organisasi anggota.³⁵

Hubungan antara Nahdlatul Ulama dan Masyumi pada tahun 1951 mulai dipersoalkan. Soal struktur federasi yang mendapat dukungan Nahdlatul Ulama. anggota dari anggota

³⁴Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional...*, p.55.

³⁵Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional...*, p.55.

istimewa. Masyumi diharuskan menjadi anggota partai secara perseorangan, sehingga terjadi bahwa dari organisasi anggota Masyumi menjadi anggota suatu partai politik yang menentang partai Islam. Sampai masa dimana Masyumi dibubarkan struktur keanggotaan Masyumi yang ganda yang terdiri dari anggota perorangan serata organisasi tetap bertahan.³⁶

³⁶Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional...*, p.57.